



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

**SAMBUTAN**  
**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**PADA ACARA**  
**MUSRENBANG REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Samarinda, 4 April 2016**

*Yang terhormat Menteri Dalam Negeri,  
Yang terhormat Gubernur Kalimantan Timur,  
Yang terhormat Para Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga terkait,  
Yang terhormat Para Anggota DPRD Se-Provinsi Kalimantan Timur,  
Yang terhormat Para Anggota Muspida Se-Provinsi Kalimantan Timur,  
Yang terhormat Para Bupati dan Walikota Se-Provinsi Kalimantan Timur,  
Yang terhormat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Se- Provinsi Kalimantan Timur,  
Yang terhormat Para Tokoh Masyarakat, Akademisi, Wakil Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Se-Provinsi Kalimantan Timur, serta  
Hadirin peserta Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur yang kami muliakan.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.*

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena pada hari ini kita dapat melaksanakan Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur seiring dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 . Pertemuan seperti ini sangat penting untuk bersama-sama memberikan pemikiran dalam upaya mendorong sinergi kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan yang yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu pertama mengenai perubahan konstelasi perencanaan pembangunan nasional. Kedua terkait Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2017 termasuk penyelarasan perencanaan pusat dan daerah serta yang keempat terkait dengan isu kesenjangan dan pengembangan wilayah Kalimantan Timur.

***Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang kita laksanakan merupakan forum bersama antarpemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional untuk mensinkronisasikan rencana pembangunan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dengan usulan/kebutuhan pembangunan Pemerintah Daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Namun, pelaksanaan Forum Musrenbangnas yang berlangsung kadang dianggap sebagai forum yang bersifat “seremonial” saja.

Forum Musrenbangnas yang berlangsung kedepan diharapkan akan menghasilkan banyak kesepakatan yang tercapai. Namun mengingat ketersediaan anggaran negara yang terbatas, sementara usulan atau kebutuhan yang disampaikan sangat banyak, maka Pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyusun dan mengusulkan usulan rencana pembangunan yang benar-benar prioritas sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi agar bisa menjadi fasilitator untuk dapat mempertajam usulan Kabupaten dan Kota. Sehingga dalam pelaksanaan Musrenbangnas ke depan nanti yang hanya akan dihadiri oleh para Gubernur dapat menyampaikan usulan pembangunan yang benar-benar prioritas yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan Kabupaten/Kota dalam rangkaian pelaksanaan Musrenbang Provinsi.

Dalam hal perencanaan dan penganggaran, amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional. Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (*policy driven*), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget driven*). Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya serta meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memperbaiki kualitas belanja.

Perencanaan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan memiliki dasar hukum. Rencana Kerja Pemerintah yang sedang disusun saat ini baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menurut Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat **prioritas pembangunan**, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dipertegas kembali bahwa RKPD yang disusun wajib **berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**. Hal ini menunjukkan bahwa Program Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat juga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sementara, dalam Undang-Undang Keuangan Negara, penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Namun demikian, penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepada semua daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan

manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

***Para peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Sebagaimana arahan Bapak presiden, bahwa anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function* lagi, tetapi *money follow program prioritas*. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Sehingga perlu memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur Proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.

Untuk itu, usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019. Usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah. Dalam hal ini diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga ke dalam satu tujuan (*goal*) yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan daerah.

Saat ini Bappenas bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga sedang menyiapkan perencanaan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas nasional menjadi program dan kegiatan prioritas. BAPPENAS akan merubah fungsinya menjadi system integrator, sehingga kebijakan *money follow program* bisa berjalan dengan baik secara bertahap.

Adapun pendekatan pembangunan yang digunakan dalam penyusunan RKP 2017 adalah pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Holistik-Tematik digambarkan bahwa untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan serta Pemerintah Daerah. Integratif menunjukkan bahwa pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan *existing*, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya yang merupakan kombinasi berbagai program/kegiatan. Sedangkan spasial berarti pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain. Melalui pendekatan tersebut, saat ini Bappenas dan Kementerian Lembaga melakukan proses penetapan Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang diturunkan dari Prioritas Nasional yang telah tertuang dalam Visi-Misi dan Agenda Nawa Cita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

***Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Visi pemerintahan 2015-2019 yang dijabarkan dalam tujuh Misi Pembangunan dan sembilan Agenda Nawacita sebagai sasaran dan tujuan pembangunan 2015-2019 telah menetapkan berbagai Prioritas Nasional yang terbagi dalam tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu. Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah ditetapkan tema pembangunan yaitu **“MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI**

**UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH".** Tema pembangunan 2017 menekankan pada percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar individu maupun antar wilayah.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 telah dijabarkan beberapa sasaran makro pembangunan yang telah disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini. Untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan nasional tersebut, maka disusun Prioritas Nasional yaitu antara lain (1) Revolusi Mental; (2) Pembangunan Pendidikan; (3) Pembangunan Kesehatan; dan (4) Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang merupakan bagian dari Dimensi Pembangunan Manusia. Sementara dari dimensi sektor unggulan antara lain (1) Kedaulatan Pangan; (2) Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan; (3) Kemaritiman dan Kelautan; (4) Pariwisata; (5) Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dimensi yang ketiga yaitu dimensi pemerataan dan kewilayahan meliputi (1) Pemerataan Antarkelompok Pendapatan; (2) Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal; (3) Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan; (4) Pengembangan Konektivitas Nasional dan (5) Reforma Agraria serta Kondisi perlu yang meliputi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Penekanan **Dimensi Pembangunan Manusia** dalam RKP Tahun 2017 meliputi pengarusutamaan Revolusi Mental dalam setiap prioritas dan kegiatan pembangunan. Selain itu, penekanan pada tahun 2017 juga ditujukan untuk mempertahankan anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing 20% dan 5 % APBN dengan kebijakan pokok antara lain distribusi guru yang merata yang sekaligus akan mengendalikan biaya gaji dan tunjangan guru yang saat ini sudah sekitar separuh anggaran pendidikan. Serta melanjutkan pembangunan perumahan yang sudah dimulai di APBNP 2015 dengan program sejuta rumah. Sedangkan penekanan **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan** dalam RKP tahun 2017 meliputi Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Kemaritiman dan Kelautan. Sementara pembangunan pariwisata, kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri akan mendapat penekanan lebih lanjut dalam RKP 2017 terutama pengembangan kawasan tersebut.

Sementara itu, penekanan **Dimensi Pemerataan Antar Pendapatan dan Wilayah** ditujukan untuk pertama, menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dalam kondisi perekonomian yang masih tumbuh antara 5-6% melalui peningkatan penerima Bantuan Tunai Bersyarat dan mempertahankan dukungan untuk mengurangi beban penduduk miskin dan rentan. Kedua, reforma agraria ditujukan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. Ketiga, pengurangan kesenjangan secara tegas diamanatkan di Nawacita ke tiga dengan membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan serta pulau-pulau terluar. Pembangunan akan lebih Indonesia Sentris dibandingkan Jawa Sentris. Pendulum pembangunan harus banyak bergerak ke luar Jawa. Keempat, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung konektivitas antar wilayah serta pada penyelesaian proyek-proyek yang akan menurunkan biaya logistik dan mendukung pembangunan kawasan. Infrastruktur menjadi motor penggerak pembangunan untuk mendorong masuknya investor dengan penguatan sektor riil sehingga akan mempermudah pencapaian cita-cita dalam membangun tol laut, karena arus barang dan jasa dari jalur tol laut akan terisi penuh (orang dan) barang-barang produksi lokal.

Sementara itu, penekanan kondisi perlu (Politik, Hukum serta Pertahanan dan Keamanan) dalam RKP 2017 ditujukan untuk memenuhi secara bertahap *Minimum Essential Forces* dengan peran industri pertahanan dalam negeri yang makin meningkat. Selain itu juga diarahkan untuk memantapkan penegakan hukum, reformasi birokrasi serta konsolidasi demokrasi.

Seluruh Prioritas Nasional tersebut, selain harus didukung oleh Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program dan Kegiatan Prioritas, juga harus didukung oleh Pemerintah Daerah dengan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui pembagian Urusan Wajib dan Pilihan. Dalam kaitan ini, peran daerah memang menjadi sangat penting dalam upaya percepatan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Oleh karena itu, provinsi yang menjadi fokus percepatan pembangunan harus berperan aktif dalam implementasi percepatan pembangunan tersebut. Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) yang telah tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah. Dalam hal ini diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional yang didukung oleh Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga ke dalam satu tujuan (*goal*) yang jelas dan terukur dengan program dan kegiatan serta pendanaan daerah. Sebagai contoh, Kegiatan Prioritas Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Pembangunan Waduk yang merupakan bagian dari Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan, apabila dilihat dari sisi pembagian Urusan Daerah dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Sub Urusan Sumber Daya Air.

Dengan adanya pembagian urusan tersebut, maka kemudian dapat ditentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional tersebut di daerah. Pemetaan program prioritas nasional ke dalam program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah tersebut dapat mendukung sinergi pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sehingga pembangunan dapat berjalan secara lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran pembangunan.

#### ***Para peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Sekarang mari kita lihat isu kesenjangan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data Gini Ratio tahun 2013 dan 2014 menunjukkan bahwa kesenjangan antar individu di Provinsi Kalimantan Timur cukup rendah dan cenderung menurun yaitu pada tahun 2013 nilai Gini Ratio adalah 0,37 kemudian menurun menjadi 0,35 pada tahun 2014. Sementara itu, dari sisi kontribusi ekonomi terhadap nasional Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan dan memberikan penurunan kontribusi secara umum di wilayah Kalimantan.

Secara umum, momentum pertumbuhan wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019 diharapkan terus ditingkatkan mengingat distribusi ekonomi belum terlalu besar bagi perekonomian nasional seiring dengan upaya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Adapun tema pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu Pertama, mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Kedua, lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru

terbarukan. Ketiga, pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa. Serta Keempat, menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Sesuai dengan tema pembangunan wilayah Kalimantan tersebut, maka beberapa hal yang penting dalam arah pengembangan wilayah Kalimantan Timur dapat digambarkan sebagai berikut : Dalam dimensi pembangunan manusia, sasaran di tahun 2017 akan difokuskan pada peningkatan di bidang revolusi mental, pendidikan, kesehatan serta perumahan dan pemukiman. Di bidang **revolusi mental** beberapa diarahkan pada program prioritas antara lain Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa serta Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan. Di bidang **pendidikan**, salah satunya yang difokuskan adalah pada distribusi dan pemerataan guru di daerah terpencil, tertinggal dan terdepan. Sementara di bidang **kesehatan**, pembangunan diarahkan pada pengembangan sistem rujukan rumah sakit. Sedangkan di bidang **perumahan dan pemukiman**, pada tahun 2017 diarahkan pada Standar Pelayanan Perkotaan dan Kota Layak Huni, sarana dan parasana air baku, Tempat Pembuangan Akhir, Sistem Penyediaan Air Minum dan beberapa program prioritas lainnya.

Dalam dimensi pembangunan sektor unggulan, yang menjadi prioritas antara lain di bidang **kedaulatan pangan**. Berbagai sasaran dan rencana pembangunan kedaulatan pangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat perlu didukung baik peran dari berbagai Kementerian dan Lembaga serta juga peran dari pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pencapaian sasaran nasional merupakan agregasi dari sasaran pembangunan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat beberapa rencana indikatif pemerintah pusat melalui berbagai Kementerian/Lembaga meliputi rencana pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan bendungan/waduk serta irigasi, penyediaan alat tangkap perikanan dan lain sebagainya.

Dalam bidang **kedaulatan energi**, sesuai dengan Rencana Kelistrikan Sistem Kalimantan Timur, direncanakan pembangunan ketenagalistrikan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi saat ini. Terkait dengan bidang **kemaritiman dan kelautan**, beberapa kegiatan yang direncanakan yaitu pembangunan pelabuhan Palaran di Samarinda dan pelabuhan lainnya yang diharapkan dapat mendukung distribusi barang dan manusia. Dalam bidang **pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus**, di Kalimantan Timur telah dikembangkan pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan). Pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor unggulan daerah. Sedangkan di bidang **Pembangunan Pariwisata**, wilayah Kalimantan Timur memiliki potensi wisata alam dan bahari seperti Pulau Derawan yang perlu dikembangkan lagi untuk menarik wisatawan baik domestik dan mancanegara.

Dalam bidang pembangunan ekonomi, provinsi Kalimantan Timur diharapkan mencapai target realisasi investasi (PMA dan PMDN) pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 31,8 Triliun dengan kontribusi terhadap nasional sebesar 4,99%. Sedangkan dalam hal ekspor nonmigas, Kalimantan Timur memiliki target sebesar 12,12 miliar USD dan berkontribusi terhadap nasional sebesar 7,92%. Sedangkan untuk mendukung pembangunan ekonomi di provinsi Kalimantan Timur, terdapat 3 (tiga) rencana pembangunan pasar rakyat pada tahun 2017, yaitu pasar Baqa yang akan dibangun di Kota Samarinda, pasar Olah Bebaya Merak yang akan dibangun di Kabupaten Kutai Barat, dan pasar Sumber Sari yang akan dibangun di Kabupaten Paser Utara. Dengan adanya pembangunan pasar-pasar tersebut diharapkan perekonomian Kalimantan Timur bisa meningkat.

Dalam dimensi pemerataan dan antarwilayah, wilayah Kalimantan khususnya Kalimantan Timur merupakan wilayah yang strategis perlu didukung dalam hal konektivitas. Beberapa yang menjadi prioritas dalam hal konektivitas antara lain adalah pembangunan jalan di wilayah perbatasan di Kalimantan Timur yang dapat menghubungkan wilayah perbatasan Kalimantan secara keseluruhan dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selain itu, konektivitas juga didukung dengan pembangunan pelabuhan strategis sebagai bagian dari rencana konektivitas Tol Laut yang meliputi pembangunan pelabuhan Maloy, Palaran dan Kariangau. Pembangunan jalur kereta api juga menjadi prioritas di wilayah Kalimantan Timur, khususnya jalur Samarinda-Balikpapan-Tanjung. Konektivitas darat juga didukung dengan pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang saat ini masih berlangsung pembangunannya dimana akan terus dilakukan upaya-upaya percepatan pembangunan. Sedangkan dalam hal konektivitas udara akan direncanakan pengembangan bandara Samarinda Baru serta berbagai bandara baru lainnya di wilayah Kalimantan Timur untuk meningkatkan akses di daerah pedalaman dan perbatasan.

***Para Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Kementerian PPN/Bappenas (atau Bappeda di tingkat daerah) mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L (atau lintas SKPD) dan lintas wilayah dapat bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antar K/L (antar SKPD) dan pemerintah daerah (atau pemerintah Kabupaten/Kota) agar sinergi bisa tercapai.

Untuk mendukung prioritas nasional, maka diharapkan dalam pembahasan dengan SKPD dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follow program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan DAK yang *proposal based approach* dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional. Oleh karena itu, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan SKPD berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan.

Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Rencana Kerja Pemerintah adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan. Visi, Misi, dan Sasaran dalam RPJM Nasional 2015 - 2019 adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah 5 tahun yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Samarinda, 4 April 2016

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**ttd**

**Sofyan A. Djalil**